



Tahun 2026 TPST Piyungan Ditutup Permanen, Serius atau Hanya Wacana Terus?

**IN SIGHT**

# DAERAH BELUM SELESAI, MASIH BERGANTUNG WILAYAH

Setelah sempat buka-tutup, Pemprov DIJ akan menutup permanen Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di tahun 2026 ini. Keputusan ini serius atau hanya wacana (terus), karena faktanya hingga kemarin masih menerima kiriman sampah. Bagaimana kesiapan Kota Jogja, Sleman dan Bantul (Kartamantul) sendiri?

**WACANA** penutupan TPST Piyungan secara total belum bisa direalisasikan awal tahun ini. Sebab, penanganan sampah khususnya Kota Jogja belum sepenuhnya selesai di wilayah dan masih bergantung TPST Piyungan.

Baca Daerah... Hal 7

## PENERAPAN PRINSIP 5R

- Gunakan konsep 5R untuk meminimalkan timbulnya sampah setiap hari:
- **Reduce (Kurangi):** Batasi penggunaan barang sekali pakai, seperti kantong plastik atau sedotan.
  - **Reuse (Gunakan Kembali):** Gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai, misalnya botol bekas untuk tempat penyimpanan.
  - **Recycle (Daur Ulang):** Olah sampah menjadi bahan baku baru atau kerajinan tangan yang bernilai ekonomi.
  - **Replace (Ganti):** Ganti barang plastik dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan.
  - **Replant (Tanam Kembali):** Gunakan sisa sampah organik sebagai nutrisi untuk menanam kembali tanaman di rumah.



MASIH DIBUKA TERBATAS: Truk sampah melintas menuju TPST Piyungan, Bantul.

## Kartamantul Tangani Serius dari Hulu hingga Optimalkan TPS3R

**KARTAMANTUL** (Jogjakarta, Sleman, dan Bantul) menjadi daerah paling terdampak jika TPST Piyungan ditutup permanen. Lalu, sejauh mana tiga daerah itu menyiapkan langkah mengatasi permasalahan sampah ini? Pemkot Jogja memastikan kesiapannya

menghadapi penutupan TPST Piyungan. Upayanya dengan optimalisasi sistem pengolahan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Rajwan Taufiq mengatakan, ada empat manajemen pengelolaan sampah yang disiapkan. Pertama, reduksi sampah lewat program

Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) dengan target 25 ton per hari. Lalu kedua, optimalisasi unit pengolahan sampah (UPS) di TPS3R Kranon, TPS3R Nitikan, TPS3R Giwangan, TPS3R Karangmiri, dan TPS3R Sitimulyo dengan target pengolahan 190 ton per hari.

Baca Kartamantul... Hal 7

## Akademisi Tekankan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

**RENCANA** penutupan permanen TPST Piyungan pada 2026 belum sepenuhnya dibarengi dengan keslapan sstem pengelolaan sampah mandiri di wilayah Kartamantul (Kota Jogjakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul). Ketidaktegasan kebijakan dengan skema buka-tutup TPST selama ini juga dinilai menimbulkan inkonsistensi dalam tata kelola persampahan.

Baca Akademisi... Hal 7



**Ni Made Dwipanti Indrayanti**  
Sekprov DIJ



**Rajwan Taufiq**  
Kepala DLH Kota Jogja



**Sugeng Riyanta**  
Plt Kepala DLH Kabupaten Sleman



**Bambang Purwadi Nugroho**  
Kepala DLH Bantul



### MASALAH KONSISTENSI DAN KEBIJAKAN

**Inkonsistensi Skema Buka-Tutup:** Kebijakan pemerintah dinilai tidak tegas karena sering meralat keputusan penutupan dengan dalih "pengangkutan darurat", yang merusak komitmen tata kelola persampahan mandiri.

**Keraguan Data Pemerintah:** Terdapat keraguan akademisi terhadap angka capaian pengurangan sampah yang dilaporkan pemerintah, yang dianggap hanya "polesan" agar terlihat berhasil sementara volume sampah di lapangan tetap tinggi.

### KESIAPAN WILAYAH (KARTAMANTUL)

**Kota Yogyakarta:** Dinilai paling rawan karena keterbatasan lahan, sehingga tumpukan sampah lebih mencolok dibandingkan Sleman atau Bantul.

**Sleman & Bantul:** Terlihat lebih "aman" hanya karena memiliki lahan luas yang bisa menyemburkan tumpukan sampah, bukan sepenuhnya karena sistem pengolahan yang efektif.

**Kendala di Masyarakat:** Masyarakat awalnya kooperasi mengolah sampah mandiri, namun kini lebih memilih jasa angkut sampah swasta karena praktis, serta maraknya pembuangan sampah liar di pinggiran jalan (seperti ring road) dan tanah kosong di pekarangan.

### MUNCULNYA MASALAH BARU (EKOSISTEM ILEGAL)

**Komoditas Sampah Ilegal:** Di sekitar kawasan Piyungan, muncul praktik pengangkutan dan pembakaran sampah ilegal oleh oknum yang memasang tarif tertentu (mengadi komoditas ekonomi baru).

**Bahaya Lingkungan:** Praktik pembakaran sampah ini melepaskan mikroplastik ke udara yang berisiko masuk ke rantai makanan manusia.

**Residu TPS3R:** Banyak TPS3R yang kini kewalahan karena residu sampah mereka tidak bisa lagi dikirim ke TPST, sehingga menumpuk tanpa solusi.

# Daerah Belum Selesai, Masih Bergantung Wilayah

Sambungan dari hal 1

"Jadi sementara ini masih (menerima). (Ditutup) tidak ketat-ketat banget, tutup total gitu belum bisa juga, karena masih banyak pertimbangan (sampah) ini mau dikesmanakan," ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (2/1).

Sampai saat ini, Pemkot Jogja masih meminta bantuan evakuasi sampah ke provinsi. Terakhir, pemkot melalui surat permintaan resmi Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo yang ditujukan kepada Pemprov DIJ meminta evakuasi sampah di TPST Piyungan sebanyak 300 ton per minggu.

"Kami memberi kuota, tapi tidak banyak. Kalau diakumulasikan dengan sisa kuota yang ada di sana tidak bisa sepenuhnya tertampung," bebarnya.

Made, sapaan akrabnya, mengapresiasi kebijakan terbaru Pemkot Jogja terkait pelarangan pembuangan sampah organik ke depo. Namun diharapkan Kota Jogja terus mencari solusi terbaik karena kuota evakuasi sampah ke TPST Piyungan juga tidak bisa maksimal.

"Kalau sana (TPST Piyungan) over itu khususnya air lingkungannya sangat mengganggu lingkungan," ucapnya.

Tahun ini, di area TPST Piyungan juga akan segera dibangun pabrik pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) oleh pemerintah pusat melalui Danantara. Harapannya, permasalahan sampah di DIJ dapat tertangani. Sebab, pabrik itu diproyeksikan dapat mengolah 1.000 ton sampah per hari.

"Tapi itu kan jangka waktunya paling cepat 18 bulan baru bisa operasional, karena sedang proses oleh Danantara," jelasnya.

Selama 18 bulan itu, pemkab/pemkot diminta bisa menangani sampahnya secara mandiri. Apabila tidak bisa selesai secara total, TPST Piyungan masih bisa diakses. Namun tidak banyak dan terakhir hanya disediakan 3.000 ton. "Kami punya cadangan sebenarnya untuk 18 bulan itu," katanya.

Bangunan PSEL akan didirikan di atas tanah seluas 5,7 hektar di area TPST Piyungan. Tugas daerah hanya menyiapkan transportasi atau alat angkut dari sumber sampah menuju ke Piyungan apabila pabrik itu beropera-

si. Saat ini prosesnya masih *open bidding*. "Ground breaking-nya kalau tidak salah Maret nanti," tandasnya.

La belum bisa memastikan apakah TPST Piyungan bisa ditutup secara total sebelum *ground breaking* atau tidak. Evakuasi sampah masih tetap bisa dilakukan secara terbatas pasca-*ground breaking*. "Lahan untuk *ground breaking* dan evakuasi sampah kan berbeda, jadi masih bisa," jelasnya.

Menurutnya, PSEL tak hanya mengolah sampah baru. Namun juga bisa mengolah timbunan sampah yang tergolong lama. "Jadi kalau pabrik ini sudah berdiri, (sampah) yang menggunung (di TPST Piyungan) itu akan habis juga. Tapi kami juga tidak tahu pengoperasionalnya besok diperbolehkan tidak," paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Kusno Wibowo membenarkan rencana penutupan TPST Piyungan dilakukan awal tahun 2026. Namun, sampai saat ini masih akan dikoordinasikan kembali terkait keputusan hingga teknis lainnya. "Minggu pertama Januari ini kami masih evakuasi untuk timbulan sampah Nataru," ujarnya. (oso/laz/fj)

# Kartamantul Tangani Serius dari Hulu hingga Optimalkan TPS3R

*Sambungan dari hal 1*

Ketiga, pemkot bekerjasama dengan Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran di Bantul dengan target pengolahan 20 sampai 50 ton per hari. Kemudian terakhir, sampah dari Kota Jogja juga akan diolah lewat kerja sama PT JOS di Kabupaten Sleman dengan target 25 ton per hari.

Total kemampuan pengolahan sampah yang bisa dilakukan dengan empat langkah itu diketahui mencapai 290 ton. "Kami berharap langkah-langkah ini dapat menyelesaikan sampah harian Kota Jogja yang sebanyak 260 hingga 300 ton per hari," ujar Rajwan kemarin (4/1).

Ia menyatakan, pihaknya optimistis mampu menghadapi tantangan penutupan TPST Piyungan. Sebab, mulai Januari ini juga melarang pembuangan sampah organik ke depo. Jika kebijakan itu berhasil, maka kemungkinan 130

ton sampah dapat tereduksi.

Meskipun demikian, mantan kabag Administrasi Pembangunan Kota Jogja itu ingin masyarakat mendukung program tersebut. Yakni dengan terus melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing.

Sementara itu, penutupan TPST Piyungan membuat Pemkab Sleman sebagai salah satu penyumbang sampah, harus bergerak cepat. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman Sugeng Riyanta menilai, penutupan memang sudah jadi kebijakan yang harus dijalankan.

"Terkait desentralisasi pengelolaan sampah ini, kami harus siap menghadapinya," terangnya saat dikonfirmasi kemarin (4/1). Salah satu strategi utamanya adalah mengoptimalkan tiga tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang sudah beroperasi. Mulai dari TPST Sendangsari,

TPST Tamanmartani, dan TPST Donokerto.

Satu TPST dengan tiga modul alat ditargetkan setidaknya bisa mengelola sampah 45 ton per hari. Namun, saat ini masih belum bisa maksimal karena rata-rata berkisar antara 15 hingga 20 ton per harinya.

Strategi lainnya adalah mengoptimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R). Sekaligus transfer depo yang ada. "Kami juga tetap mengajak masyarakat untuk melakukan pilah dan olah sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga," katanya.

Untuk Kabupaten Bantul, DLH setempat menyiapkan dua opsi penanganan sampah apabila TPST Piyungan ditutup secara permanen. Langkah ini disiapkan sebagai respons atas kondisi TPST yang telah mencapai kapasitas maksimal.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho meng-

atakan, opsi pertama yang dilakukan adalah mengoptimalkan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R yang sudah ada. Selain itu, DLH Bantul juga akan mengoptimalkan pemanfaatan mesin-mesin pengolahan sampah yang tersedia di TPST.

"Opsi berikutnya adalah penanganan sampah dari hulu. Masyarakat wajib melakukan pemilahan sampah, khususnya memisahkan sampah organik dan anorganik," jelasnya saat ditemui Jumat (2/1).

Ia menjelaskan, penyelesaian sampah organik dapat dilakukan langsung di tingkat rumah tangga. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pamong diwajibkan menggunakan biopori, losida, maupun komposter unit. Sementara bagi warga yang memiliki ternak seperti ayam atau bebek, sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. **(inu/del/cin/laz/fj)**

# Akademisi Tekankan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

Sambungan dari hal 1

Pandangan itu disampaikan Sekretaris Jurusan Teknik Lingkungan (JTL) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (UII) yang juga Ketua Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehat Kabupaten Sleman Dr Hijrah Purnama Putra. Ia menyoroti, persoalan penutupan TPST Piyungan sesungguhnya sudah muncul sejak lama, termasuk sepanjang tahun 2025 yang terus mengalami tarik ulur kebijakan.

"Sejak Maret 2025 saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) sudah ada komitmen pengelolaan dikembalikan ke masing-masing kabupaten. Tapi celah untuk dibuka sesuai kondisi wilayah juga diberlakukan, jadi muncul pengangkutan darurat kembali ke TPST Piyungan," jelasnya kemarin (4/1).

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar hendak menutup TPST Piyungan secara permanen, maka langkah evaluasi menyeluruh terhadap upaya pengelolaan mandiri di masing-masing daerah menjadi keharusan. "Kalau memang ditutup permanen, provinsi harusnya melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan tiap kabupaten soal pengelolaan mandiri dengan berbagai programnya," ujarnya.

Hijrah menilai berbagai



**Dr Hijrah Purnama Putra**  
Sekretaris Jurusan Teknik Lingkungan (JTL) FTSP UII

program pengurangan sampah yang diklaim berhasil, baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, masih perlu diuji secara jujur di lapangan. "Kalau kita mau jujur, dengan berbagai program yang ada di Kota Jogja misalnya, juga tidak lantas mengurangi volume sampah. Dari pandangan mata, sampah di kota volumenya masih tetap tinggi," ujarnya.

Hijrah bahkan secara terbuka cukup meragukan sebagian angka capaian pengurangan sampah yang dilaporkan oleh pemerintah kepada publik. "Kami sebagai akademisi percaya tidak percaya soal angka yang dikeluarkan. Angka itu terasa polesan agar semua orang bisa senang, sementara di lapangan volume sampah masih tinggi," tuturnya.

Menurutnya, wilayah Sleman dan Bantul relatif lebih 'tertolong' karena ketersediaan lahan yang cukup luas, sehingga tumpukan sampah tidak selalu tampak mencolok seperti di wilayah perko-

taan Jogja.

Hijrah menyebut secara garis besar masyarakat sebenarnya cukup kooperatif ketika ada imbuhan pengelolaan sampah mandiri di rumah. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama.

"Awalnya banyak masyarakat mencoba mengolah sampah mandiri di rumah. Tetapi seiring waktu muncul banyak jasa angkut sampah swasta. Tinggal bayar dan tidak perlu repot, sehingga itu yang kini jadi pilihan," ujarnya.

Di sisi lain, marak pula pembuangan sampah liar di titik-titik perbatasan. Hal itu turut menjadi persoalan yang belum benar-benar bisa terselesaikan. Ia mencontohkan fenomena di beberapa wilayah pinggiran.

"Di daerah Pajangan, Berbah, sampai perbatasan Jogja-Klaten banyak tanah kosong dijadikan tempat pembuangan dadakan. Banyak juga yang buang sampah sembarangan di sekitar ring road sambil berkendara," katanya.

Di samping itu, Hijrah turut serta menyoroti aktivitas pengelolaan sampah ilegal di sekitar kawasan Piyungan yang justru menjadi komoditas baru. "Pemerintah jangan hanya melihat TPST-nya saja. Di sekelilingnya itu banyak pembakaran sampah ilegal oleh berbagai oknum. Banyak tobong mengeluarkan asap setiap hari dan sudah dipatok harga," ungkapnya. (tza/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005